

Diskon Gajian! Spesial Ramadhan
Berlaku 28 - 31 MARET

30 HARI!
MARET

BELANJA MANTAP

SUNCO
SUPER PROMO!
Rp/pch 32.900
mks. 4 pch
SUNCO MINTAK GORENG PCH 2L

Sedaap
Rp/pck 105.000
mks. 4 pck
SEDAAP MIE GORENG PCK 910R

Sweetie
Rp/bag 59.990
mks. 4 bag
SWEETIE BABY DIAPERS SILVER PRINTS BAG 532, M28, L26, XL24 XXL22

Info lengkap: www.superindo.co.id [superindosupermarket](https://www.facebook.com/superindosupermarket) [infosuperindo](https://www.instagram.com/infosuperindo)

PELANTIKAN PEJABAT DIDUGA MELANGGAR

Dewan Pertanyakan Surat Izin dari Mendagri

SLEMAN (KR) - Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemkab Sleman pada 22 Maret 2024 menjadi sorotan dari DPRD Sleman. Pelantikan pejabat itu diduga melanggar Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota karena kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan dari penetapan calon kepala daerah.

"Ketika ditarik 6 bulan sebelumnya, berarti mulai 22 Maret 2024 sudah tidak boleh melakukan penggantian pejabat. Pertanyaannya, apakah Bupati Sleman sudah mengantongi surat izin tertulis dari Mendagri? Kalau tidak ada izin, ya itu patut diduga melanggar karena dalam UU sudah jelas bunyinya," kata Hasto Ketua Komisi A DPRD Sleman Hasto Karyantoro dalam diskusi terbatas Anggota

DPRD Sleman, Selasa (26/3) malam. Diskusi itu diikuti Ketua Komisi A Hasto Karyantoro SIP, Ketua Komisi C Rahayu Widi Nuryani SH MH, Ketua Komisi D M Arif Priyosusanto SSI dan Untung Basuki Rahmat SAg.

Hasto juga mempertanyakan apakah penggantian pejabat di lingkungan Pemkab Sleman itu melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) atau tidak. Jika ti-

dad melalui proses baperjakat, patut diduga penggantian itu hanya berdasarkan 'like and dislike'. "Kami mendapat informasi, proses penggantian itu tidak melalui Baperjakat. Kalau aturan saja diterjang-terjang, akan menimbulkan yang tidak-tidak yaitu hanya berdasarkan 'like and dislike'," ucap politisi dari Fraksi PKS ini.

Hal senada dikatakan Untung Basuki Rahmat. Menurutnya, sekarang ini bukan lagi 'debatable' apakah 22 Maret 2024 masih boleh melantik atau tidak. Kalau pelantikan kemarin tidak memiliki surat izin dari Mendagri, pelantikan itu diduga cacat hukum. "Konsekuensinya pelantikan batal. Tidak perlu lagi ada alasan menunggu SE dari Mendagri," tegas politisi dari PPP.

Untung juga menyoroti, apakah selama ini pergeseran atau penempatan jabatan itu melalui proses di Baperjakat atau tidak? Jika tidak, tentu dapat dikatakan cacat hukum. "Kalau sistem meritnya tidak jalan, Pemkab Sleman dapat runtuh karena dipegang oleh orang yang tidak memiliki kompetensi. Jadi yang kami kritisi itu sistemnya, bukan orangnya," ucap Untung.

Pelantikan pejabat itu juga mendapat kritikan dari Fraksi PKB saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman 25 Maret 2024. Menurut Rahayu Widi Nuryani SH MH, mutasi dan promosi besar-besaran sebanyak 39 pejabat Pemkab Sleman menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bahkan pelantikan kemarin terkesan 'like

and dislike'. "Padahal dalam pengangkatan pejabat ada peran Baperjakat yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam menentukan pejabat," kata perempuan yang kerap dipanggil Nunung ini.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar SSos MH menyatakan, pihaknya akan mengirimkan surat klarifikasi ke Pemkab Sleman. Hal itu dikarenakan ada tafsir yang berbeda terkait batas waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon itu. "Nanti kami akan klarifikasi dulu. Seperti apa pandangan hukum Pemkab seperti apa terkait aturan tersebut. Selanjutnya kami akan konsultasi ke Bawaslu DIY untuk memaknai batas waktu 6 bulan itu," kata Arjuna.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman, R Budi Pramono SIP MSi mengaku, sebelumnya Pemkab Sleman telah konsultasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dimana KASN menyebutkan, pada 22 Maret 2024 masih boleh melakukan pergantian pejabat. Selain itu, KASN juga telah memberikan rekomendasi pelantikan pimpinan pratama Pemkab Sleman.

"Kami mengadakan pelantikan karena sudah konsultasi ke KASN dan berpendapat bahwa 22 Maret batas akhir melakukan pergeseran pejabat. Kemudian surat rekomendasi itu baru kami terima 21 Maret sore. Otomatis kami baru menggelar pelantikan keesokan harinya," ujarnya. (Sni)-f

Terima Motor Dinas, PLKB Sleman 'Sumringah'



Bupati Kustini memeriksa kendaraan operasional para PLKB.

SLEMAN (KR) - Wajah-wajah para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Sleman, Rabu (27/3) tampak sumringah. Pasalnya, mereka mendapat kendaraan operasional yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sleman Kustini di Kantor

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman.

Bupati berharap kendaraan operasional yang telah diserahkan ini dapat menunjang kegiatan para

PLKB. Sehingga pelayanan KB di Kabupaten Sleman turut meningkat.

"Memberikan penyuluhan memang tidak mudah. Tapi sukses tidaknya KB di Kabupaten Sleman, ada di tangan panjenengan. Sehingga dengan adanya kendaraan ini, diharapkan bisa lebih leluasa menjalankan tugasnya," ucap Bupati.

Sementara Kepala Dinas P3AP2KB Wildan Solichin menyebut, kendaraan ini nantinya akan digunakan untuk menunjang kegiatan antar jemput akseptor. Kendaraan ini juga disebut telah sesuai standar yang telah ditetapkan BKKBN. "Kendaraan ini melengkapi kendaraan operasional yang sebelumnya. Sebelumnya kita mendapatkan 17 sepeda motor," jelasnya. (Has)-f

SAVA RESCUE SELOPAMIORO TURUN TANGAN Redam Kasus DBD, Gencarkan PSN

BANTUL (KR) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul terus mendorong masyarakat agar gencar melakukan Pembantasan Sarang Nyamuk (PSN). Langkah tersebut perlu diambil untuk mencegah melonjaknya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Merujuk data Dinkes Bantul, per Maret 2024, terdapat 70 pasien kasus (DBD).

"Angka kasus DBD sampai Maret 2024 ini ada 70 pasien. Sedang sepanjang tahun 2023 jumlah kasus DBD di Bantul ini mencapai 136 kasus," ungkap Kepala Dinkes Kabupaten Bantul, Agus Tri Widyan-tara, Selasa (26/3). Dijelaskan, meningkat-

nya kasus DBD ditengarai akibat akhir tahun lalu baru mulai musim penghujan. Sehingga awal tahun ini diprediksi perkembangan nyamuk mulai banyak. Selain itu juga dipicu banyaknya genangan-genangan air yang ada di pekarangan.

Hal tersebut kemudian menjadi potensi meningkatnya kasus DBD. "Untuk penekanannya lebih

intensif melakukan gerakan PSN. Kemudian juga dengan program yang kita sampaikan namanya yakni masing-masing rumah itu ada yang memantau jentik di lingkungannya. Baik yang ada di dalam rumah ataupun di luar rumah," ujarnya.

Sementara itu SAVE Rescue Selopamioro Imogiri tengah gencar mencegah kasus DBD mening-

kat. "Sasaran yang kita bersihkan dalam program PSN tersebut ialah segala sesuatu yang bisa menimbulkan genangan air dan bisa untuk berkembang biak nyamuk. Misalnya tunggak bambu, ban bekas, botol, sampai kaleng," ujar salah satu personel SAVE Rescue Selopamioro Imogiri, Anang Zainudin. (Roy)-f



Menangkap Peluang Plesiran Pemudik Lebaran

SEKTOR pariwisata masih menjadi andalan bagi Sleman dalam upaya akselerasi atau percepatan pertumbuhan ekonomi riil dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari tahun 2023, target 7 juta wisatawan dapat terlampaui hingga mencapai 110%. Untuk tahun 2024 ini diperkirakan kita akan kedatangan 7,5 juta wisatawan baik itu domestik maupun manca negara. Pariwisata masih menjadi lokomotif yang efektif bagi pergerakan ekonomi masyarakat Sleman.

Selama libur cuti bersama dan lebaran, Dinas Perhubungan DIY memberikan prediksi kurang lebih sebanyak 6,5 juta pemudik dari berbagai daerah asal akan memasuki wilayah DIY dan sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi. Akses utama menuju DIY dari wilayah timur melalui Prambanan, dari wilayah utara melalui Tempel, dan dari barat melalui Gamping. Sedangkan potensi wisata yang kita miliki, pada wilayah Sleman Timur memiliki seribu candi, destinasi wisata Tebing Breksi, beberapa desa wisata, dan kuliner Ayam Goreng Kalasan untuk dikunjungi. Untuk Sleman utara melewati Tempel, pemudik disambut dengan kuliner sajian khas Brongkos Tempel dan destinasi wisata Grojogan Watu Purba, dapat mengakses langsung melalui jalur alternatif untuk berwisata lereng Merapi di Kaliurang atau Cangkringan dan juga jalur alternatif ke Sleman barat yang akan mampir ke Desa Wisata Budaya maupun Desa Wisata Kerajinan, atau Studio Alam Gemplong. Untuk wisatawan yang sudah masuk di wilayah Sleman tengah dan kadang dengan sajian gudeg dapat singgah di Sentra Gudeg Berek.

Sebaran kuliner, destinasi dan desa wisata dan juga fasilitas akomodasi tersebar relatif merata di semua wilayah di Kabupaten Sleman. Fasilitas akomodasi hotel sejumlah 248 hotel

Wabup Danang Maharsa SE



dengan jumlah 10.143 kamar siap menerima tamu yang akan istirahat di paruh perjalanannya. Berdasar referensi cuti bersama dan libur hari raya tahun lalu, okupansi hotel mencapai 75 - 100%. Agar lebih nyaman sebaiknya pemudik melakukan reservasi terlebih dahulu.

Dalam kesempatan ini Saya mengimbau masyarakat Sleman pada umumnya dan para pelaku pariwisata Sleman agar bersiap diri untuk menerima tamu, baik yang mudik maupun singgah beristirahat sejenak. Saya minta pengelola-pengelola destinasi dan desa wisata, juga hotel dan restoran berupaya memastikan kebersihan, kesejukan, dan keindahan terpelihara dengan baik. Walaupun masa pandemi sudah berakhir, kebiasaan baik terkait CHSE perlu terus diupayakan untuk memberikan kenyamanan tamu wisatawan, dengan terapan tidak ketat seperti waktu masa pandemi. Kita harus mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi tamu-tamu istimewa kita.

Melalui tulisan ini saya mengajak seluruh warga Sleman untuk menjadi tuan rumah yang baik, untuk tamu-tamu kita. Budaya tertib juga perlu diterapkan, sebagai contohnya budaya antri, tertib berlalu lintas, dan tertib harga alias tidak aji mumpung nuthuk harga, akan membuat tamu yang masuk Sleman merasa aman dan nyaman. Yang penting dan kadang terlupakan adalah ramah. Keramahan merupakan modal yang harus ada untuk menumbuhkan ekosistem pariwisata agar dapat terus maju dan berkesinambungan. Sleman merupakan bagian dari DIY yang terkenal sebagai daerah yang ramah dan baik penduduknya. Mari kita sambut para pemudik menikmati bentang alam Sleman dengan aman dan nyaman.

JAKSA MASUK SEKOLAH

Cegah Penyimpangan Keuangan Negara

BANTUL (KR) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul bekerja sama dengan Pemkab Bantul meluncurkan program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Sahabat Guru. Program tersebut merupakan upaya mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan negara di lingkungan pendidikan.

Program tersebut direalisasikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama di Aula SMPN 1 Bantul, Selasa (26/3), dihadiri perwakilan guru SMP se-Kabupaten Bantul. Dilanjutkan sosialisasi pendampingan sekolah.

Menurut Kajari Bantul, Farhan SH MH, melalui program Jaksa Masuk Sekolah ini, para guru sekolah di Bantul mendapat pendampingan jaksa dari Kejari Bantul dalam hal pengelolaan dana yang bersumber dari keuangan negara yang dihibahkan ataupun menjadi bantuan ke sekolah.

"Kami melakukan pendampingan dari sisi perdata dan tata usaha negara melalui bantuan hukum, pertimbangan hukum dan lainnya. Dengan maksud bagaimana kami memitigasi risiko yang mungkin akan dihadapi bapak ibu guru, kepala sekolah dalam hal risiko hukum," ungkapnya.

Kajari berharap, dengan adanya pendampingan hukum yang dilakukan lewat program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Sahabat Guru ini



Penandatanganan perjanjian kerja sama Jaksa Masuk Sekolah oleh Bupati dan Kajari Bantul.

nantinya risiko-risiko yang mungkin dan akan dihadapi bisa diminimalisasi, bahkan diharapkan tidak ada penyimpangan pengelolaan keuangan. Sementara Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih, mengemukakan program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Sahabat Guru yang diluncurkan Kejari bersama Pemkab Bantul dapat mencegah guru maupun kepala sekolah salah dalam memanfaatkan keuangan yang berdampak pada persoalan hukum.

Dana yang dikelola sekolah ada

bantuan operasional sekolah daerah, Bosnas dan hibah-hibah lainnya. Ada pula kerja sama dengan pihak luar itu anggaran besar. Maka jangan sampai mereka salah memanfaatkan dana-dana itu, termasuk dana orang tua yang terhimpun di dalam komite.

"Dengan program Jaksa Masuk Sekolah tersebut ada pendampingan dari penegak hukum kepada para guru dan kepala sekolah agar dapat mengelola dan memanfaatkan keuangan sekolah dengan benar, tanpa ada penyimpangan," papar Bupati. (Jdm)-f